



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), *TAX EFFORT*, DAN
BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH**

Syafira Frijunita¹, Ety Gurendrawati², Tri Hesti Utamingtyas³

^{1,2,3} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Abstract

This research aims to determine the influence of regional own-source revenue (PAD), tax effort, and capital expenditure on the level of regional financial independence. Sampling was conducted using purposive sampling. The analytical technique employed was panel data regression, with a sample size of 34 districts and/or cities. The data used in this study were secondary data obtained from the official websites of districts/cities in Central Java Province. The results of the t-test indicate that PAD has a positive effect on the level of regional financial independence. Tax effort does not significantly affect the level of regional financial independence. Capital expenditure also does not affect the level of regional financial independence. Meanwhile, the F-test results show that PAD, tax effort, and capital expenditure can be used to predict the level of regional financial independence

Keyword: *PAD, Tax Effort, Capital Expenditure, The Level of Regional Financial Independence*

How to Cite:

Frijunita, S., Gurendrawati, E., Utamingtyas, T.H., (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Tax Effort, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*, Vol. 5, No.2, hal 256-269.

PENDAHULUAN

Era reformasi memberikan banyak tuntutan kepada pengaturan pemerintahan dengan lebih baik. Satu diantara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu adanya kebijakan desentralisasi di Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi yang berkaitan dengan pemerintah pusat juga daerah, yaitu terciptanya daerah otonom juga transfer resmi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bersama dengan otoritas sebagaimana diberikan kepada pemerintah daerah guna mengurus pemerintahan mereka sendiri, serta memberikan kesempatan kepada wilayah untuk sepenuhnya memanfaatkan sumber daya daerahnya untuk mencapai kemandirian finansial. Selain itu, kemandirian dapat diartikan bahwa daerah tersebut mampu untuk menentukan seluruh kegiatan pemerintahannya termasuk dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah tanpa adanya peran dari pemerintah pusat.

Terlepas dari kecenderungan PAD yang meningkat, masihlah banyak pemerintah daerah yang mana tampaknya selalu mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian keuangan di wilayah ini dapat ditentukan melalui perbandingan PAD terhadap keseluruhan penerimaan daerah. Tingkat kemandirian keuangan di daerah ikut meningkat selaras akan rasio PAD pemerintah setempat. Upaya dalam meningkatkan pajak mencerminkan kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi penerimaan pajak sesuai dengan estimasi atau potensi seharusnya. Selain menjadi faktor primer sebagaimana dimanfaatkan pemerintah setempat guna mendanai belanja modal, PAD sekarang merupakan penentu penting dari tingkat kemandirian keuangan daerah. PAD memungkinkan pemerintah daerah guna memiliki kontrol lebih besar terhadap keuangan mereka sendiri, sehingga bisa meminimalkan dependensi pemerintah daerah pada pemerintah pusat, dan memungkinkannya agar mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif sesuai dengan kebutuhan daerah.

Penelitian sebelumnya oleh Wahyuni (2019) dan Nurliza Arpani & Halmawati (2020), melakukan penelitian mengenai PAD kepada kemandirian keuangan daerah. Hasil dari kedua studi tersebut, memperlihatkan bahwasannya PAD mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Studi ini berbeda akan studi Rio Baviga; Zenia Bahrin (2022) menunjukkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh pada tingkat otonomi keuangan wilayah

Penelitian sebelumnya oleh Oktavia & Handayani (2021) dan Nur Oktavianti et al. (2023) tentang pengaruh *tax effort* pada kemandirian keuangan tidak mengungkapkan adanya hubungan antara *tax effort* dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Studi tersebut, bertentangan akan studi Rahmayani (2018), dimana menemukan bahwasannya *tax effort* mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya oleh Misra Sarumaha & Annisa Annisa (2023) dan Oktavia & Handayani (2021) tentang pengaruh pengeluaran belanja modal pada tingkat kemandirian keuangan daerah menemukan bahwa belanja modal mempunyai dampak negatif pada tingkat kemandirian keuangan. Tetapi, penelitian tersebut berbeda akan pernyataan Amalia & Haryanto (2019) dimana menyatakan bahwasannya belanja modal tidaklah berdampak pada tingkat kemandirian keuangan daerah.

Peneliti menemukan *research gap* yaitu kontradiksi atau terdapat perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh belanja modal, *tax effort*, dan PAD pada tingkat kemandirian keuangan di daerah tersebut. Melalui pemeriksaan sampel dari kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dan 2022, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi *gap* tersebut.

KAJIAN TEORI

Teori *Stewardship*

Teori stewardship menggambarkan situasi di mana para manajer tidak hanya terfokus pada pencapaian sasaran pribadi mereka, namun mengarah kepada pencapaian hasil esensial yang mendukung keperluan organisasi secara keseluruhan. Penjelasan tersebut berarti bahwasannya teori *stewardship* mencakup aspek psikologi juga sosiologi sebagaimana sudah dikembangkan, di mana eksekutif atau manajer bertindak selaku *steward* (pengelola) yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan utama yang diinginkan oleh organisasi. Teori tersebut dirancang untuk peneliti-peneliti guna menguji suatu keadaan disaat eksekutif didalam suatu organisasi bertindak selaku pelayan bisa terdorong guna berlaku melalui cara yang paling baik kepada principalnya (Davis et al., 2018)

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menjadi tolak ukur didalam menilai kemampuan sebuah pemerintah daerah didalam mendanai secara mandiri seluruh aktivitas pemerintahannya, tanpa harus mengandalkan dukungan selain dari daerahnya, juga pemerintah pusat. Menurut penelitian Oktavia & Handayani (2021), tingkat kemandirian keuangan daerah bisa diukur menggunakan proksi seperti dibawah:

$$TKKD = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Transfer pemerintah pusat dan provinsi}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan asli daerah yangmana didapat berlandaskan prosedur pencarian sumber-sumber potensial daerah dimana disebabkan oleh penyerahan wewenang sebagaimana didapatkan dari pemerintah, berlandaskan otonomi daerah selaku desentralisasi. PAD berasalkan pajak juga pungutan daerah, hasil pengaturan aset daerah sebagaimana dipisahkan, juga sebagainya pendaptan daerah secara legal (Elsye, 2020). Menurut Wahyuni (2019), PAD dapat diukur dengan realisasi PAD dibagi anggaran PAD dikali 100 persen, seperti berikut ini:

$$PAD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tax Effort

Tax effort diartikan selaku perbandingan diantara pendapatan pajak sebagaimana didapat kepada perkiraan pendapatan pajak semestinya bisa didapat ataupun potensi pendapatan pajak (*taxable capacity*) (Kristiaji et al., 2021). Menurut Oktavia & Handayani (2021) *tax effort* bisa diukur dengan memanfaatkan proksi seperti dibawah:

$$\text{Tax effort} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Produk Regional Domestik Bruto (PDRB)}} \times 100\%$$

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran biaya guna penerimaan aktiva tetap juga aktiva lain yangmana membagikan kegunaan lebih dari satu rentang waktu akuntansi (Kuntadi et al., 2022). Menurut Wahyuni (2019) belanja modal dapat diukur seperti berikut ini:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berkaitan teori *stewardship*, pemerintah daerah dianggap memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya daerah dengan cara yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi tetapi lebih mengutamakan kepentingan publik. Prinsip *stewardship* memastikan bahwa pengelolaan PAD harus dilakukan sesuai dengan tujuan. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan bahwa penggunaan PAD akan secara efektif mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan finansial daerah.

Dalam studi sebagaimana dijalankan Wahyuni (2019), Nurliza Arpani & Halmawati (2020) serta Oktavia & Handayani (2021) memperlihatkan bahwasannya pendapatan asli daerah berdampak kepada tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan tadi, hipotesa yang ada diuji didalam studi ini, yaitu:

H_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Pengaruh *Tax Effort* terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Teori *stewardship* menekankan bahwa pemerintah, dalam perannya sebagai pengelola (*steward*), memiliki tanggung jawab utama didalam mengatur sumber daya publik melalui memprioritaskan keperluan masyarakat umum (*principal*). Salah satu sasaran primer akan aktivitas tersebut ialah guna menaikkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan *tax effort*, pemerintah tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga memperkuat koneksi dan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat, serta mendukung pencapaian tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas.

Dalam studi sebagaimana dijalankan Oktavia & Handayani (2021) juga Nur Oktavianti et al. (2023) memperlihatkan bahwasannya *tax effort* tidaklah berdampak kepada tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Timur. Berlandaskan penjelasan tersebut, hipotesa dimana ada diuji didalam studi ini, yaitu:

H_2 : *Tax Effort* tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

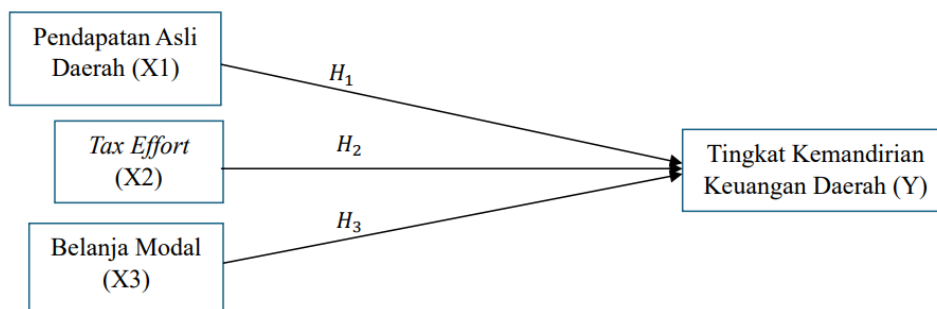
Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berkaitan dengan teori *stewardship*, belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pengelola memiliki tanggung jawab didalam mengatur sumber daya sebagaimana dipunyai dengan efektif juga efisien, serta menggapai tujuan-tujuan publik dengan optimal. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan untuk memastikan pelaporan yang transparan dan akurat terkait penggunaan dana publik serta alokasi sumber daya. Pengalokasian sumber daya ini diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur yang ada di wilayah tersebut, sehingga berkontribusi positif terhadap kesejahteraan dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia & Handayani (2021) serta Wahyuni (2019) memperlihatkan bahwasannya belanja modal berdampak negatif kepada tingkat kemandirian keuangan daerah. Berlandaskan penjelasan tadi, hipotesa dimana ada diuji dalam studi ini, yaitu:

H_3 : Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Berikut merupakan kerangka konseptual yang dibuat berdasarkan pengembangan hipotesis dan penelitian terdahulu:



Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2024
Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana memanfaatkan data sekunder. Data dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu portal Badan Pusat Statistik (BPS) juga *website* resmi tiap-tiap Kabupaten/Kota.

Metode pengambilan sampel didalam studi adalah *purposive sampling*. Studi ini memfokuskan pada Kabupaten juga Kota di Provinsi Jawa Tengah melalui kriteria berikut:

Tabel 1 Kriteria Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1	Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah	35
2	Kabupaten dan Kota yang tidak mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran	(1)
	Jumlah sampel yang dapat digunakan	34
	Kurun waktu penelitian	2
	Total data yang digunakan dalam penelitian	68

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dikerjakan dengan tujuan membagikan representasi general mengenai variabel-variabel sebagaimana ada didalam studi.

Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	TKKD	PAD	Tax Effort	Belanja Modal
Mean	3,242353	4,701471	- 0,539853	2,620735
Median	3,165000	4,695000	- 0,595000	2,640000

Maximum	4,650000	4,970000	2,300000	4,070000
Minimum	2,530000	4,390000	-	0,520000
			1,550000	
Std. Dev.	0,411035	0,127071	0,628613	0,422103
Observations	68	68	68	68

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

Menurut analisis ini, rasio kemandirian keuangan daerah mempunyai nilai minimum 2,53 dan nilai maksimum 4,65, yang tercatat di Kota Semarang tahun 2022. Rasio kemandirian keuangan daerah mempunyai nilai rata-rata 3,24 dimana standar deviasinya yaitu 0,411. Temuan tersebut memperlihatkan bahwasannya data rasio kemandirian keuangan daerah kurang bervariasi

Untuk menentukan PAD, dapat menggunakan skala rasio dengan membandingkan antara realisasi PAD dengan anggaran PAD. Nilai terkecil adalah 4,39 dan nilai terbesar adalah 4,97. Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 memiliki nilai tertinggi, sementara Kabupaten Pekalongan tahun 2022 mempunyai nilai paling rendah. Nilai rata-rata adalah 4,70, dimana standar deviasinya yaitu 0,13. Karena standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, temuan tersebut memperlihatkan bahwasannya data kurang bervariasi.

Variabel *tax effort* dapat dihitung dengan realisasi penerimaan pajak dibagi dengan PDRB. Nilai maksimumnya adalah 2,30, dan nilai minimumnya adalah -1,55. Kabupaten Kudus memiliki nilai terendah di tahun 2021, sementara Kota Semarang memiliki nilai paling tinggi. Variabel *tax effort* mempunyai nilai rata-rata -0,54 dan standar deviasi 0,63. Temuan tersebut memperlihatkan bahwasannya data mengenai *tax effort* bervariasi.

Nilai belanja modal bervariasi antara 0,52 sebagai nilai minimum hingga 4,07 sebagai nilai maksimum. Rata-rata variabel belanja modal adalah 2,62 dimana standar deviasinya 0,42. Temuan tersebut memperlihatkan bahwasannya data untuk variabel belanja modal tidak bervariasi banyak.

Model Regresi Data Panel

Guna menetapkan model terbaik dalam pengelolaan data panel, Berikut pengujian untuk menentukan model regresi data panel didalam studi:

Uji Chow

Uji chow dilakukan guna memilih model regresi terbaik diantara *common effect model* juga *fixed effect model*. Perolehan uji chow dilihat dari Cross-section Chi-square, jika probabilitas $< 0,05$, dipilihlah *fixed effect model*, tetapi probabilitas $> 0,05$, dipilihlah *common effect model*.

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	23.006612	(33,31)	0.0000
Cross-section Chi-square	220.205888	33	0.0000

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

Gambar 2 Uji Chow

Perolehan uji chow tersebut menunjukkan bahwasannya nilai probabilitasnya $0,0000 < 0,05$. Sehingga, pada uji chow untuk studi ini model regresi sebagaimana terpilih ialah *fixed effect method*.

Uji Hausman

Uji hausman dikerjakan guna menetapkan model regresi paling baik diantara *fixed effect model* dengan *random effect model*. Bila probabilitas $< 0,05$, dipilihlah *fixed effect model*, tetapi probabilitas $> 0,05$, dipilihlah *random effect model*.

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	24.862286	3	0.0000

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

Gambar 3 Uji Hausman

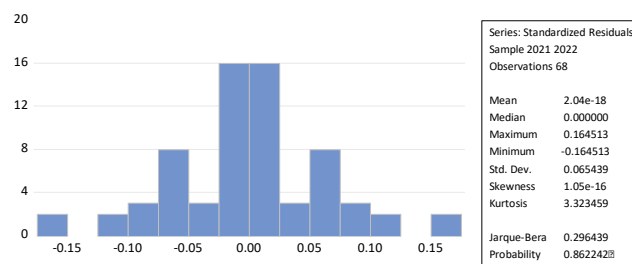
Uji hausman didalam gambar diatas memperlihatkan bahwasannya nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Oleh karena itu, model regresi sebagaimana terpilih ialah *fixed effect model*.

Berdasarkan dua uji model yang sudah dilakukan, model terbaik sebagaimana ditetapkan yakni *fixed effect model*. Sehingga, uji lagrange multiplier (LM) tidaklah dikerjakan dikarenakan sudah dipastikan bahwa *fixed effect model* menjadi model regresi terbaik untuk penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas ialah guna menetapkan benarkah variabel-variabel didalam studi mempunyai distribusi normal ataupun tidak. Persebaran normal adalah asumsi penting dalam banyak metode analisis statistik karena mempengaruhi validitas dan interpretasi hasil penelitian.



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

Gambar 4 Uji Normalitas

Berlandaskan gambar tersebut, dapat diketahui bahwasannya probabilitas $0,862242 > 0,05$. Bisa ditarik kesimpulan bahwasannya data didalam studi tersebar normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan didalam mengevaluasi benarkah ditemukan hubungan yang signifikan antara variabel-variabel independen didalam model regresi.

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1,000000	-0,221515	0,151367
X2	-0,221515	1,000000	0,033603

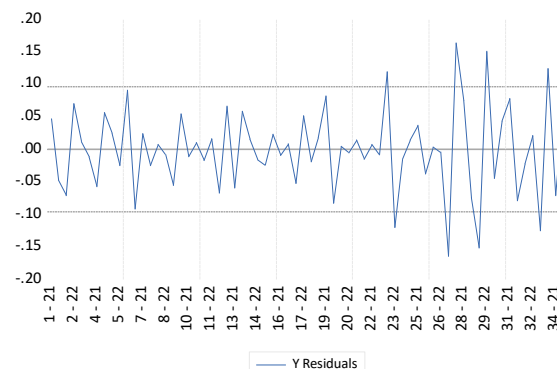
X3	0,151467	0,033603	1,000000
-----------	----------	----------	----------

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

Uji multikolinieritas yang merujuk pada tabel tersebut, memperlihatkan bahwasannya nilai korelasi X1 (PAD) dengan X2 (*tax effort*) yaitu -0,221515. Nilai korelasi X1 (PAD) dengan X3 (belanja modal) sebesar 0,151367, nilai tersebut < 0,90 Nilai korelasi X2 (*tax effort*) dengan X3 (belanja modal) berada pada angka 0,033603, angka tersebut < 0,90. Bisa ditarik kesimpulan bahwasannya data didalam studi tidaklah memperlihatkan terdapatnya gejala multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Guna menetapkan benarkah terjadi perbedaan dalam varian residual di antara observasi didalam sebuah model regresi, merupakan tujuan dilakukannya uji heteroskedastisitas.



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

Gambar 5 Uji Heterokedastisitas

Grafik residual yang memiliki warna biru tidak melewati batas yaitu 500 dan -500 artinya *variance* residual adalah sama (Baskara & Rohmadi, 2023). Berlandaskan gambar tersebut, bisa ditinjau bahwasannya grafik residual tidak melewati batas, sehingga data didalam studi tidaklah timbul gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Data Panel

Model penelitian paling baik didalam studi ini yakni *fixed effect model*. Berikut perolehan perkiraan regresi data panel melalui penggunaan pendekatan *fixed effect model*.

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/25/24 Time: 19:40
Sample: 2021 2022
Periods included: 2
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 68

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.102105	0.608628	-0.167762	0.8679
X1	0.720027	0.131142	5.490450	0.0000
X2	0.043103	0.044655	0.965234	0.3419
X3	-0.006617	0.042959	-0.154026	0.8786

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.975260	Mean dependent var	3.242302
Adjusted R-squared	0.946531	S.D. dependent var	0.411223
S.E. of regression	0.095089	Akaike info criterion	-1.565292
Sum squared resid	0.280299	Schwarz criterion	-0.357619
Log likelihood	90.21994	Hannan-Quinn criter.	-1.086775
F-statistic	33.94592	Durbin-Watson stat	3.885714
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah oleh peneiti, 2024

Gambar 6 Analisis Regresi Data Panel

Dari gambar 6, bisa didapat persamaan regresi data panel seperti dibawah:

$$Y = -0,102105 + 0,720027X_1 + 0,043103X_2 - 0,006617X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
 X_1 = Pendapatan Asli Daerah
 X_2 = *Tax Effort*
 X_3 = Belanja Modal
 ε = Error

Berlandaskan persamaan regresi, dapat dijelaskan bahwa koefisien konstanta adalah -0,102105. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah ikut menghadapi penurunan sebanyak 0,102105, jika variabel PAD, tax effort, dan belanja modal semuanya memiliki nilai nol.

Koefisien untuk PAD adalah 0.720027, berarti bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah ikut meningkat sebanyak 0.720027, jika PAD bertambah satu unit sementara variabel lain tetap nol. Sementara itu, koefisien untuk *tax effort* adalah 0.043103, artinya, dengan asumsi semua variabel lain nol, kenaikan satu unit didalam tax effort menyebabkan peningkatan sebanyak 0.043103 didalam tingkat kemandirian keuangan daerah. Koefisien untuk belanja modal adalah -0.006617, yang berarti bahwa, dengan asumsi semua variabel lain tetap nol atau tidak berubah, kenaikan satu unit didalam belanja modal menyebabkan penurunan sebanyak 0.006617 didalam tingkat kemandirian keuangan daerah.

Uji Hipotesis

Uji T

Berlandaskan gambar 6, hasil uji T menyimpulkan bahwa PAD mempunyai nilai signifikan yaitu 0,0000, dimana lebih kecil daripada 0,05. Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya PAD mempunyai dampak signifikan kepada tingkat kemandirian keuangan daerah, hipotesis nol (H_0) ditolak serta hipotesis alternatif (H_a) diterima. Mengingat bahwasannya probabilitas *tax effort* yaitu 0,3419 > 0,05, bisa dikatakan bahwasannya *tax effort*

tidak berdampak kepada tingkat kemandirian keuangan lokal, H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan nilai probabilitas yaitu $0,8786 > 0,05$ untuk variabel belanja modal, H_0 diterima serta H_a ditolak, menunjukkan bahwa belanja modal tidaklah berdampak kepada tingkat kemandirian keuangan dalam sebuah komunitas.

Uji F

Berdasarkan gambar 6, menunjukkan bahwa nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Temuan ini memperlihatkan bahwasannya PAD, *tax effort*, juga belanja modal bisa dimanfaatkan guna memprediksi tingkat kemandirian keuangan daerah.

Uji Koefisien Determinasi

Seberapa efektif model bisa menguraikan variasi didalam variabel independen ditunjukkan oleh koefisien determinasi. Berdasarkan gambar 6, didapatkan bahwasannya nilai adjusted R-squared adalah 0,946531. Sehingga, aspek-aspek sebagaimana diteliti didalam studi menjelaskan sebesar 94,65% dari tingkat kemandirian keuangan daerah, sementara variabel berbeda dimana tidaklah dimasukkan didalam analisis menjelaskan sisanya, yaitu 5,35%.

Pembahasan

Pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan di daerah secara signifikan dipengaruhi oleh PAD. Hal tersebut berarti bahwa naik turunnya PAD dapat berdampak langsung pada tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Selaku upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, PAD dianggap sangat penting. Sebuah daerah memiliki peluang lebih baik untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, jika semakin besar jumlah PAD yang diperolehnya. Di sisi lain, sebuah pemerintah daerah akan lebih bergantung pada dukungan keuangan dari pemerintah pusat, jika menerima jumlah PAD yang relatif kecil.

Rasio PAD kepada tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami perubahan pada beberapa wilayah, seperti Kota Semarang dan Kabupaten Batang. Di Kota Semarang, rasio PAD mengalami kenaikan sebesar 8,99% dari tahun 2021 hingga 2022. Di tahun 2021, rasio PAD Kota Semarang mencapai 91,50%, yang meningkat menjadi 100,49% di tahun 2022. Dampak dari kenaikan tersebut ialah peningkatan rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Semarang sebanyak 2,25%. Di tahun 2021, tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Semarang adalah 102,82%, yang naik menjadi 105,07% di tahun 2022.

Di sisi lain, Kabupaten Batang mengalami penurunan dalam rasio PAD sebesar 10,99%. Pada tahun 2021, rasio PAD Kabupaten Batang mencapai 117,84%, namun mengalami penurunan menjadi 106,85% di tahun 2022. Perubahan ini juga berdampak pada rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Batang yang menghadapi penurunan sebanyak 1,97%. Pada tahun 2021, tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Batang adalah 22,74%, yang turun menjadi 20,77% di tahun 2022. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bagaimana dinamika PAD dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, melalui kenaikan PAD cenderung meningkatkan kemandirian dan sebaliknya, penurunan PAD dapat mengurangi kemandirian daerah akan dana asistensi dari Pemerintah Pusat.

Perolehan penelitian ini selaras akan penelitian yang dijalankan Oktavia & Handayani (2021) juga Wahyuni (2019). Selain dua penelitian tersebut, penelitian sebagaimana dijalankan Nurliza Arpani & Halmawati (2020) juga memiliki hasil serupa. Perolehan penelitian ini tidaklah selars akan penelitian yang sebagaimana dijalankan Rio Baviga; Zenia Bahrin (2022), menyatakan bahwa PAD tidak berdampak signifikan kepada tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh *Tax Effort* terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan pada suatu daerah tidak dipengaruhi oleh *tax effort*. Pernyataan tersebut bermakna bahwasannya variasi dalam tingkat kemandirian keuangan daerah tidak terpengaruh akan peningkatan atau penurunan *tax effort*. Tidaklah terdapat korelasi secara jelas diantara tingkat pajak dan tingkat kemandirian keuangan di suatu daerah. Kejadian tersebut diakibatkan adanya kenyataan bahwa sejumlah besar pemerintah kabupaten dan kota masihlah amat bergantung kepada dana hibah dari pemerintah pusat. Karena ketergantungan secara kuat pada sumber pendanaan eksternal, upaya untuk meningkatkan pajak daerah hanya akan memiliki efek terbatas pada tingkat kemandirian keuangan di daerah tersebut.

Tax effort tidaklah memiliki pengaruh kepada tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa kenaikan atau penurunan dalam *tax effort* tidaklah memiliki dampak kepada perubahan tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Tidaklah ada hubungan secara jelas antara tingkat pajak dan tingkat kemandirian keuangan di suatu daerah. Kejadian tersebut diakibatkan adanya kenyataan bahwa sejumlah besar pemerintah kabupaten dan kota masihlah amat bergantung kepada dana bantuan dari pemerintah pusat. Karena ketergantungan secara kuat pada sumber pendanaan eksternal, upaya untuk meningkatkan pajak daerah hanya akan memiliki efek terbatas pada tingkat kemandirian keuangan di daerah tersebut

Menurut analisis statistik deskriptif, Kabupaten Kudus memiliki nilai terendah dari variabel *tax effort*. Namun, nilai terendah dari variabel tingkat kemandirian keuangan daerah bukanlah datang dari Kabupaten Kudus. Temuan tersebut memperlihatkan bahwasannya meskipun Kabupaten Kudus mengalami penurunan dalam *tax effort*, perubahan ini memiliki sedikit dampak kepada tingkat kemandirian keuangan daerah pada wilayah tersebut. Kejadian tersebut memperlihatkan bahwasannya faktor-faktor lain, mungkin memiliki pengaruh lebih besar didalam menetapkan tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kudus.

Perolehan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya sebagaimana dijalankan Nur Oktavianti et al. (2023) dan Oktavia & Handayani (2021). Akan tetapi, penelitian tersebut tidaklah selaras akan penelitian sebagaimana dijalankan Rahmayani (2018) juga Muhammad (2021) dimana menyebutkan bahwa *tax effort* berdampak kepada tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Belanja modal tidak memiliki pengaruh kepada tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti bahwasannya perubahan dalam pengeluaran belanja modal tidaklah memiliki pengaruh kepada peningkatan atau penurunan tingkat kemandirian keuangan di suatu daerah tertentu. Distribusi anggaran belanja modal daerah belum dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan analisis statistik deskriptif, nilai terendah dari variabel tingkat kemandirian keuangan daerah terletak pada Kabupaten Wonogiri, sementara nilai terendah dari variabel belanja modal ditemukan di Kabupaten Semarang. Kejadian tersebut memperlihatkan bahwasannya meskipun terjadi peningkatan atau penurunan belanja modal di Kabupaten Semarang, perubahan tersebut tidak cukup untuk mempengaruhi kenaikan atau penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut.

Perolehan penelitian ini selaras akan penelitian sebagaimana dijalankan Amalia & Haryanto (2019) dan Sutrisno & Santoso (2021). Akan tetapi, penelitian ini tidak selaras akan penelitian sebagaimana dijalankan Wahyuni (2019) dimana menyebutkan bahwasannya belanja modal berdampak kepada tingkat kemandirian keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini ialah guna menguji dampak antara tingkat kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal, *tax effort*, dan PAD. Data sekunder sebagaimana berasal dari laporan realisasi anggaran kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah digunakan dalam penelitian ini. Selama dua tahun, penelitian melibatkan 28 kabupaten juga 6 kota pada Provinsi Jawa Tengah, dimana keseluruhan sampelnya sebanyak 68. Perolehan studi ini bisa diringkas seperti dibawah:

1. PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. *Tax effort* tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
3. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Saran

Berlandaskan keterbatasan studi ini, dibawah ini referensi untuk studi selanjutnya:

1. Diharapkan bahwa studi berikutnya, bisa meningkatkan jumlah periode penelitian. Sampel dalam studi ini diamati hanya untuk dua periode penelitian.
2. Untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan akurat, diharapkan bahwa penelitian selanjutnya akan meningkatkan ukuran sampel dengan melibatkan kabupaten atau kota.
3. Diharapkan bahwa melalui penelitian selanjutnya, variabel berbeda dimana bisa memengaruhi tingkat kemandirian keuangan di suatu daerah dapat dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. F., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39. <https://doi.org/10.37058/jak.v13i1.708>
- Baskara, D. Y., & Rohmadi. (2023). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi IPM Jawa Timur dengan PDRB sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBiMA)*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.58477/ebima.v2i2.122>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (2018). Toward a stewardship theory of management. *Business Ethics and Strategy, Volumes I and II*, 22(1), 473–500. <https://doi.org/10.4324/9781315261102-29>
- Elsye, R. (2020). *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah*. Alqaprint Jatinangor.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. In *Alfabeta* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–99).
- Kristiaji, B. B., Vissaro, D., & Ayumi, L. (2021). Mempertimbangkan Reformasi Pajak Daerah berdasarkan Analisis Subnational Tax Effort. *DDTC Working Paper, September*, 1–25.
- Kuntadi, C., Basri, H., Ahmadi, L. P., & Munzaroh, R. (2022). *Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah* (1st ed.). PT Penerbit IPB Press.
- Misra Sarumaha, & Annisa Annisa. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2), 98–111. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i2.199>
- Muhammad, N. F. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan, Pdrb Per Kapita, Tax Effort, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017). *Diponegoro Journal of Economics*, 10(2), 2011–2017. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Nur Oktavianti, A., Sri Mulyani, H., Ginanjar, Y., Sulviani, A., & Suhendar, D. (2023). The Effect of Local Own Source Revenue, Tax Effort, and Capital Expenditure on The Level of Regional Financial Independence (Study on District / City Government in West Java Province Period 2019-2021). *Finance and Business Management Journal*, 1(1), 39–45. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/fbmj/article/view/5900/pdf>
- Nurliza Arpani, W., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373–2390. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218>
- Oktavia, C., & Handayani, N. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–20.
- Purwohedi, U. (2022). *Metode Penelitian Prinsip dan Praktik*.

- Rahmayani, M. W. (2018). Analisis Tentang Kemandirian Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 5, 1–10.
- Rio Baviga; Zenia Bahrin. (2022). Pengaruh PAD, Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci. *Profita*, 4(1), 52–62.
- Sutrisno, M. T., & Santoso, A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel. *Majalah Inspiratif*, 7, 6.
- Wahyuni, E. (2019). Pengaruh Kinerja Penadapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(6), 1–16.